SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Gubernur DIY

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

KGPAA PAKU ALAM X
Wakil Gubernur DIY

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat DIY yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun 2020.

Penyusunan dan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab kami sebagai Gubernur kepada masyarakat DIY. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga merupakan tanggung jawab pelaksanaan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY bahwa Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DIY sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Daerah DIY. Visi Pembangunan DIY sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022, yaitu:
"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam "Lima Kemuliaan" atau "Panca Mulia" yakni:
1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sehingga Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diejawantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017-2022 sebagai berikut:
1) Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban
2) Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Demokratis

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2020 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selaras dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

A. GAMBARAN UMUM:

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7°.33'-8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00'-110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km² atau 0,16% dari luas Indonesia (1.916.906,77 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:
1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km² (18,71%)
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km² (16,22%)
3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km² (45,69%)
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,35%)
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,04%)

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian sebagai berikut:
1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/desa
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 berdasarkan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Semester II tahun 2020 (Per 31 Desember 2020) adalah sebanyak 3.671.189 orang. Persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2020 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 1.082.754 orang (29,49%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sejumlah 954.706 orang (26,01%), Kabupaten Gunungkidul sejumlah 774.609 orang (21,10%), Kabupaten Kulon Progo sejumlah 443.007 orang (12,07%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 416.117 orang (11,33%).

Gambar Grafik Persebaran Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2021

B. CAPAIAN KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian pembangunan manusia DIY sampai dengan tahun 2020 berada pada level 79,97 dan berada dalam kategori "IPM Tinggi" (70≤IPM<80). Meskipun sedikit menurun dibanding tahun 2019, namun secara umum capaian IPM DIY terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2020. Selama satu dekade, IPM DIY meningkat dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 79,97 pada tahun 2020 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,59% setiap tahunnya. Penurunan capaian IPD DIY pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan indeks pada dimensi standar hidup yang layak yang tidak mampu dikompensasi oleh kenaikan indeks pada kedua dimensi yang lain yakni kesehatan dan pengetahuan. Daya beli penduduk selama masa pandemi Covid-19 menurun tajam sehingga pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan tercatat lebih rendah dari tahun 2019. Meskipun demikian, capaian IPM DIY tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan level IPM nasional dan menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2010-2020

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY
Menurut Komponen, 2015-2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Usia Harapan Hidup/UHH (Tahun)	74,68	74,71	74,74	74,82	74,92	74,99
Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)	15,03	15,23	15,42	15,56	15,58	15,59
Rata-Rata Lama Sekolah/RLS (Tahun)	9,00	9,12	9,19	9,32	9,38	9,55
Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rp)	12.684	13.229	13.521	13.946	14.394	14.015
IPM	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97
Pertumbuhan IPM (%)	1,02	1,01	0,65	0,81	0,74	-0,03

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

2. Angka Kemiskinan

Gambar Angka Kemiskinan DIY Tahun 2016-2020

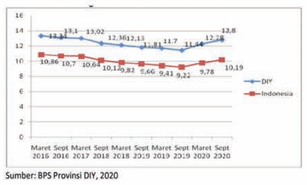

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

3. Angka Pengangguran

Pada tahun 2020 penganggur berpendidikan SMA dan SMK masih mendominasi yaitu mencapai 53,48% diposisi kedua adalah penganggur berpendidikan tinggi (diploma & universitas) sebesar 24,55% diikuti dengan penganggur berpendidikan SMP kebawah 21,96%. Tingginya penganggur berpendidikan SMA dan SMK disebabkan karena jumlah lulusan yang semakin banyak dan mereka berada pada masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mencari dan memilih pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan DIY Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Berdasarkan graifik di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY masih berada dibawah TPT Nasional. TPT DIY tahun 2016 sebesar 2,72% dan nasional sebesar 5,61%, sedangkan TPT DIY tahun 2020 sebesar 4,57 % dan nasional sebesar 7,07%. Namun demikian TPT harus diupayakan untuk tidak cenderung naik.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2020, nilai PDRB DIY sebesar Rp 138.388 triliun atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 101.679 triliun. Perekonomian DIY selama 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,69 persen (c-to-c), berbeda arah pertumbuhan dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,60 persen. Secara sektoral, kontraksi terutama dipicu oleh lapangan usaha transportasi serta penyediaan akomodasi dan makan – minum. Sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen mengalami kontraksi , termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Indonesia Tahun 2016-2020 (%)

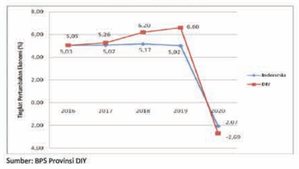

Sumber: BPS Provinsi DIY

5. Pendapatan Per Kapita

Nilai PDRB per Kapita DIY Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

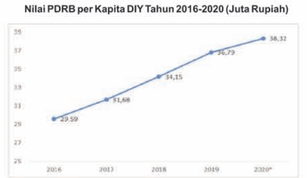

Sumber: BPS Provinsi DIY (2020) dan olahan
*Keterangan: *) proyeksi*

Meskipun mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, namun nilai PDRB ADHB per kapita di DIY pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan menggunakan data jumlah penduduk Sensus Penduduk 2020 (per September 2020), PDRB ADHB per kapita tahun 2020 sebesar Rp38,32 juta yang meningkat Rp1,53 juta dari Rp36,79 juta pada tahun 2019.

6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)
Perkembangan Gini Ratio
Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY
Bulan September 2014 – September 2020

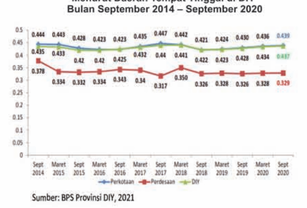

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya. Angka Gini Ratio DIY pada September 2020 tercatat sebesar 0,437 atau naik 0,003 poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 0,434. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, angka tersebut termasuk pada kategori ketimpangan sedang. Hal ini tercermin dari persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah yang besarnya mencapai 15,66 persen dari totalpengeluaran penduduk DIY.

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Urusan Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah DIY 2020

No	Wilayah	Penduduk DIY 16-18 th	Murid Keseluruhan					APK (Termasuk Paket C %)
			SMA	SMK	MA	Paket C	Jumlah	
1	Bantul	39.846	14.050	16.821	5.766	210	36.847	92,47
2	Sleman	46.702	14.905	20.515	6.262	236	41.918	89,75
3	Gunungkidul	30.553	7.491	17.223	2.166	67	26.947	88,19
4	Kulon Progo	18.898	4.270	11.293	2.226	23	17.812	94,25
5	Yogyakarta	19.510	16.115	10.800	2.242	480	29.637	151,90
	DIY	*155.509*	*56.831*	*76.652*	*18.662*	*1.016*	*153.161*	*98,49*

Sumber: Data Dikpora 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah DIY 2020

No	Wilayah	Penduduk DIY 16-18 th	Murid Usia 16-18 Tahun					APM (Termasuk Paket C %)
			SMA	SMK	MA	Paket C	Jumlah	
1	Bantul	39.846	11.296	14.047	4.546	29	29.918	75,72
2	Sleman	46.702	11.357	17.644	4.198	104	33.303	76,74

No	Wilayah	Penduduk DIY 16-18 th	Murid Usia 16-18 Tahun					APM (Termasuk Paket C %)
			SMA	SMK	MA	Paket C	Jumlah	
3	Gunungkidul	30.553	5.401	15.077	1.587	69	22.134	71,79
4	Kulon Progo	18.898	3.928	7.173	1.302	9	12.412	65,31
5	Yogyakarta	19.510	12.622	12.537	1.948	64	27.171	137,21
	D.I.Yogyakarta	*155.509*	*44.604*	*66.478*	*13.581*	*275*	*124.938*	81,90

Sumber: Data Dinas Dikpora 2021

Jumlah Siswa Disabilitas Sekolah Inklusi

No	Kabupaten/Kota	SD Inklusi			SMP Inklusi			SMA Inklusi			SMK Inklusi			Total
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
1	Kab. Bantul	360	156	516	93	25	118	17	13	30	10	7	17	681
2	Kab. Gunungkidul	131	53	184	77	29	106	8	1	9	8	1	9	308
3	Kab. Kulon Progo	101	36	137	11	6	17	3	4	7	1	2	3	164
4	Kab. Sleman	142	53	195	11	2	13	19	12	31	6	2	8	247
5	Kota Yogyakarta	144	84	228	7	5	12	45	60	105	42	56	98	443
	Jumlah total	878	382	1260	199	67	266	92	90	182	67	68	135	1.843

Sumber: Data Dinas Dikpora 2020

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapat layanan di SLB

No	Kabupaten/Kota	TKLB			SDLB			SMPLB			SMALB			Total
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
1	Kab. Bantul	21	15	36	451	262	713	228	169	397	214	142	356	1.502
2	Kab. Gunungkidul	4	4	8	324	207	531	138	91	229	50	58	108	876
3	Kab. Kulon Progo	11	4	15	132	109	241	102	51	153	36	34	70	479
4	Kab. Sleman	30	16	46	520	302	822	231	167	398	175	126	301	1.567
5	Kota Yogyakarta	15	8	23	162	108	270	106	62	168	71	51	122	583
	Jumlah	81	47	128	1589	988	2.577	805	540	1345	546	411	957	5.007

Sumber: Data Dinas Dikpora 2021

2. Urusan Kesehatan

Target dan Realisasi Urusan Kesehatan di DIY tahun 2020

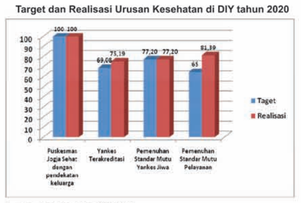

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Faktor pendorong tercapainya target puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga pada tahun 2020 adalah:
1. Kapasitas Petugas meningkat sebagai hasil dari Pelatihan PISPK
2. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk mendukung tercapainya target puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga serta Dukungan APBD Kabupaten untuk peningkatan kapasitas puskesmas dalam pelaksanaan PISPK
3. Target 121 puskesmas melaksanakan PISPK, terealisasi 121 puskesmas (100%). Pelaksanaan PISPK telah mencapai target, karena kegiatan yang difasilitasi APBD provinsi, dukungan APBN dan APBD kabupaten/kota untuk peningkatan kapasitas puskesmas dalam pelaksanaan PISPK (bimtek, koordinasi dan monev), dukungan BOK, BLUD, kapitasi puskesmas dan APB Desa untuk penerapan PISPK di Puskesmas.

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu diukur dengan persentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi pada tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 69,08% telah terealisasikan sebesar 75,19 % dengan realisasi capaian sebesar 108,84%.

Gambar Grafik Data Kejadian Luar Biasa di DIY Tahun 2020

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

3. Urusan Pekerjaan Umum

Gambar Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum di DIY Tahun 2020

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

Tabel Data Penduduk DIY Terlayani Air Minum Tahun 2020

No	Kabupaten	Perpipaan	Non Perpipaan	Belum Ada Akses
1	Sleman	340.444	875.391	16.763
2	Bantul	155.221	823.483	51.294
3	Yogyakarta	100.658	335.278	-
4	Gunung Kidul	268.540	270.788	209.947
5	Kulon Progo	154.111	279.546	826
	Jumlah	1.018.973	2.584.486	278.829
	Total Akses Air Minum	3.603.459		
	Capaian Akses	92,82%		

Sumber : Dinas PUPESDM DIY, 2021

Gambar Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Yang Terbangun di DIY Tahun 2020

Sumber: Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2021

Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA/TPA Regional)

No	Wilayah KPY	Jumlah TPA (unit)	Volume yang masuk (ton/hari)
1	Kota Yogyakarta	1	268,38
2	Kabupaten Bantul		136,10
3	Kabupaten Sleman		277,44
4	Kabupaten Gunungkidul	1	47,61
5	Kabupaten Kulon Progo	1	43,20
	Jumlah Total	3	772,73

Sumber : Data Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota, 2021

3. Urusan Penataan Ruang

Grafik Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2018-2020

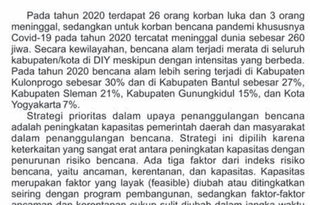

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Grafik Persentase Penduduk Yang Menempati Tempat Tinggal Yang Layak di DIY Tahun 2018-2020

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020

LOKASI	DATABASE KAB	TER TANGANI TH 2017	TER TANGANI TH 2018	TER TANGANI TH 2019	PENANGANAN RTLH 2020					SDH TER TANGANI TH 2020
					DAK	BSPS	KAB/ KOTA	CSR	PROP	
Kota Yogyakarta	2.797	227	488	552	139	150	50	6	0	345
Kab. Kulon Progo	14.891	2.106	2.005	2.400	111	708	250	24	0	1.093
Kab. Bantul	5.701	2.101	1.848	2.365	138	1.577	0	7	0	1.722
Kab. Sleman	16.347	1.863	1.447	2.130	165	1.038	306	27	0	1.536
Kab. Gunungkidul	25.840	912	1.934	3.112	151	1.527	0	22	161	1.861
JUMLAH	65.578	7.309	7.722	10.555	704	5.000	606	86	161	6.557

Sumber: Dinas PUP-ESDM DIY, 2021

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Grafik Rerata Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Lingkungan di DIY Tahun 2018-2020

Sumber: Satpol PP DIY, 2021

Trend Kejadian Bencana Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 s.d 2020

Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY, 2020

Pada tahun 2020 terdapat 26 orang korban luka dan 3 orang meninggal, sedangkan untuk korban bencana pandemi khususnya Covid-19 pada tahun 2020 tercatat meninggal dunia sebesar 260 jiwa. Secara kewilayahan, bencana alam terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di DIY meskipun dengan intensitas yang berbeda. Pada tahun 2020 bencana alam lebih sering terjadi di Kabupaten Kulonprogo sebesar 30% dan di Kabupaten Bantul sebesar 27%, Kabupaten Sleman 21%, Kabupaten Gunungkidul 15%, dan Kota Yogyakarta 7%.

Strategi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Strategi ini dipilih karena keterkaitan yang sangat erat antara peningkatan kapasitas dengan penurunan risiko bencana. Ada tiga faktor dari indeks risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Kapasitas merupakan faktor yang layak (feasible) dibuh atau ditingkatkan seiring dengan program pembangunan, sedangkan faktor-faktor ancaman dan kerentanan cukup sulit diubah dalam jangka waktu lima tahun pembangunan.

Gambar Grafik Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2018-2020

Sumber: Bakesbangpol DIY, 2021

6. Urusan Sosial

Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosial di DIY Tahun 2020

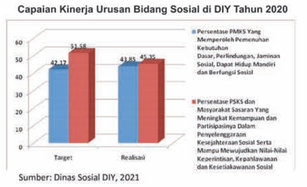

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2021

Jumlah Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di DIY Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Penerima Layanan SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	485
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	280
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	1.324
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	415
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencanabagi korban bencana provinsi.	2.832

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2021

8. Urusan Tenaga Kerja

Tahun 2020 capaian realisasi indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan sedikit melampaui target yaitu sebesar 100,57%. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, indikator jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan pada tahun 2020 ditargetkan mencapai 1.575 orang dengan realisasi hingga 2020 sebesar 1584 orang. Apabila capaian 2020 dibandingkan target akhir tahun pada RPJMD yaitu tahun 2022 maka capaiannya sebesar 60,34%. Indikator ini bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,62% (capaian tahun 2019 sebesar 106,19%). Capaian hingga tahun 2020 sebanyak 1.584 orang dengan rincian pempatan pada tahun 2019 sebanyak 1.115 orang bertambah 469 penempatan pada tahun 2020. Keberhasilan capaian indikator ini dengan mengoptimalkan lulusan pelatihan dan pemagangan tahun sebelumnya untuk ditempatkan serta dari lulusan pelatihan kegiatan selain APBD.

Capaian realisasi indikator pada sasaran terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja yaitu jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2020 ini sebesar 143,33% sehingga sangat baik. Indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun 2019 mengalami peningkatan 33,33% (capaian tahun 2019 110%). Berdasarkan dokumen RPJMD TA 2017-2022, indikator jumlah kasus yang diselesaikan diluar pengadilan hubungan industrial pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 30 kasus dan terealisasi sebesar 43 kasus sehingga capaian realisasinya sebesar 143,33%. Melonjaknya jumlah kasus hubungan industrial sebagai dampak pandemic covid-19 dan keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh bertambahnya sumber daya manusia Mediator Hubungan Industrial dan pemanfaatan Tehnologi Informasi (TI) yaitu penyelesaian kasus secara daring dan luring.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambar Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di DIY Tahun 2017-2020

Sumber: DP3AP2 DIY, 2021

10. Urusan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di DIY tahun 2015-2020

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021 (data diolah)

Perbandingan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal dan Capaian Skor PPH DIY Tahun 2020